

Sejarah, Pendidikan Multikultural di JepangRahman¹rahmanumar292@gmail.comSipuan²Sipuan1969@gmail.comHery Noer Aly³alisanusa59@gmail.comZulkarnain⁴Ismail⁵**Abstrak**

Masyarakat Jepang diketahui dengan ciri- ciri sebagai berikut: Kemauan yang kuat untuk mempelajari hal-hal baru dan meniti hal-hal yang dapat mengembangkan kebudayaan Jepang. Mengagumi ide – ide asing dengan cermat memilih hal-hal yang dapat diterima sesuai dengan kondisi Jepang. Menghargai kecakapan dan prestasi seseorang lebih tinggi daripada latar belakang atau keturunan. Ciri – ciri tersebut di atas membuat Negara Jepang untuk dapat bergerak lebih cepat dalam pengembangan pendidikan. Setiap warga memiliki kewajiban untuk mengembangkan daya intelektual dan moral mereka, melaksanakan hukum dan mempersembahkan keberaniannya deminegara untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan istana kaisar.

Setiap warga memiliki kesempatan yang sama menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal usul keluarga, bantuan finansial, bagi yang memerlukan, kebebasan akademik, dan tanggung jawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai. Perbedaan yang lain adalah mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi Kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat di bawah ayah yang sama, yakni Kaisar. Adapun tujuan pendidikan menurut adalah untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas.

Kata Kunci : Sejarah, Multikultural, Jepang

¹ UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

² UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

³ UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

⁴ UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

⁵ UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

1. Pendahuluan

Jepang, sebuah negara adidaya ekonomi dengan infrastruktur media yang canggih, tidaklah kebal terhadap arus kecenderungan global tersebut. Walaupun begitu, wacana akademis yang dominan tentang Jepang pada umumnya, dibingkai dengan sebuah idealisme politik tentang ‘Jepang yang multikultur’.

Perkembangan pendidikan di Jepang secara tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan Jepang, tentang bagaimana masyarakat Jepang berhasil berkembang dari tradisional menjadi masyarakat industri modern. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Jepang mampu untuk beradaptasi dan mempunyai kemampuan untuk bergerak terhadap perubahan zaman. Dalam perkembangannya, masyarakat Jepang melakukan reformasi dan mempersiapkan diri dari datangnya pengaruh kebudayaan lain. Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang berhasil berkembang dari tradisional menjadi masyarakat industri modern dengan caranya sendiri. Keberhasilan Jepang disebabkan keberhasilan adaptasi terhadap model – model pembaharuan yang berasal dari luar dan kondisi masyarakat Jepang yang berusia ribuan tahun memiliki kekuatan – kekuatan yang memungkinkan untuk survival, bahkan menjadi masyarakat modern berkategori kelas satu di dunia.⁶

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka/ studi literatur yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan pendidikan multikultural. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan Studi Literatur, seperti mengupas (criticize), membandingkan (compare), meringkas (summarize), dan mengumpulkan (synthesize) suatu literatur. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi literatur dengan menitik beratkan pada segi mengupas, meringkas dan mengumpulkan suatu literatur, kemudian diberikan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.⁷

⁶ Citra Kurniawan, *Wawasan Pendidikan : Studi Komparatif Sistem Pendidikan Di Beberapa Negara Maju (Korea Selatan dan Jepang)*

⁷ Moh Nazir, “Metode Penelitian,” *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 2018.

3. Pembahasan

Sejarah pendidikan multicultural di Jepang

Dimulai setidaknya pada abad keenam, ketika pembelajaran Tiongkok diperkenalkan di istana Yamato. Peradaban asing seringkali memberikan ide-ide baru bagi perkembangan budaya Jepang. Ajaran dan gagasan Tiongkok mengalir ke Jepang dari abad keenam hingga kesembilan. Bersamaan dengan masuknya Buddhisme muncul sistem penulisan bahasa Tionghoa dan tradisi sastra, dan Konfusianisme. Pada abad kesembilan, Heian-kyō (sekarang Kyoto), ibukota kekaisaran, memiliki lima institusi pendidikan tinggi, dan selama sisa zaman Heian, sekolah-sekolah lain didirikan oleh bangsawan dan istana kekaisaran. Selama periode abad pertengahan (1185–1600), biara-biara Buddhis Zen adalah pusat pembelajaran yang sangat penting, dan Sekolah Ashikaga, Ashikaga Gakkō, berkembang pesat pada abad ke-15 sebagai pusat pendidikan tinggi.

Pada abad keenam belas dan awal abad ketujuh belas, Jepang mengalami kontak yang intens dengan kekuatan besar Eropa. Misionaris Jesuit, yang menemani pedagang Portugis, mengajarkan agama Kristen dan membuka sejumlah sekolah agama. Dengan demikian, siswa Jepang mulai belajar bahasa Latin dan musik klasik Barat, serta bahasa mereka sendiri.

Jepang sangat dipersatukan oleh rezim Tokugawa (1600–1867); dan akademi Neo-Konfusianisme, Yushima Seidō di Edo adalah lembaga pendidikan utama negara. Kepala administrasinya disebut Daigaku-no-kami sebagai kepala sekolah pelatihan Tokugawa untuk birokrat shogun. Ketika zaman Tokugawa dimulai, hanya sedikit orang biasa di Jepang yang bisa membaca atau menulis. Pada akhir zaman, pembelajaran telah menyebar luas.

Selama periode Tokugawa, peran banyak dari bushi, atau samurai, berubah dari prajurit menjadi birokrat pemerintah, dan sebagai akibatnya, pendidikan formal dan literasi mereka meningkat secara proporsional. Kurikulum Samurai menekankan moralitas dan mencakup studi militer dan sastra. Klasik Konfusianisme dihafal, dan membaca serta melafalkannya adalah metode belajar yang umum. Aritmatika dan kaligrafi juga dipelajari. Beberapa samurai dan bahkan rakyat jelata juga menghadiri akademi swasta, yang sering mengkhususkan diri dalam mata pelajaran tertentu Jepang atau kedokteran Barat, ilmu militer modern, meriam, atau Rangaku (studi Belanda). Pendidikan umum disediakan untuk Samurai, orang-orang biasa mengajarkan dasar-dasar kepada anak-anak mereka sendiri atau bergabung bersama untuk mempekerjakan seorang

guru muda. Pada tahun 1860-an, 40-50% anak laki-laki Jepang, dan 15% anak perempuan, bersekolah di luar rumah. Angka ini sebanding dengan negara-negara besar Eropa pada saat itu (selain Jerman, yang memiliki sekolah wajib). Pada tahun 1858 Fukuzawa Yukichi mendirikan sekolah swasta studi Barat yang kemudian menjadi Universitas Keio, yang dikenal sebagai institut terkemuka dalam pendidikan tinggi Jepang.

Setelah tahun 1868, kepemimpinan baru membuat Jepang berada di jalur modernisasi yang cepat. Para pemimpin Meiji mendirikan sistem pendidikan publik untuk membantu Jepang mengejar ketinggalan dengan Barat dan membentuk negara modern. Misi seperti misi Iwakura dikirim ke luar negeri untuk mempelajari sistem pendidikan negara-negara Barat terkemuka. Mereka kembali dengan gagasan desentralisasi, dewan sekolah lokal, dan otonomi guru. Ide-ide dan rencana awal yang ambisius, bagaimanapun, terbukti sangat sulit untuk dilaksanakan. Setelah beberapa kali trial and error, muncullah sistem pendidikan nasional yang baru. Sebagai indikasi keberhasilannya, pendaftaran sekolah dasar meningkat dari sekitar 30% persen populasi usia sekolah pada tahun 1870-an menjadi lebih dari 90 persen pada tahun 1900, meskipun ada protes keras dari masyarakat, terutama terhadap biaya sekolah.

Konsep modern masa kanak-kanak muncul di Jepang setelah tahun 1850 sebagai bagian dari keterlibatannya dengan Barat. Para pemimpin era Meiji memutuskan negara-bangsa memiliki peran utama dalam memobilisasi individu—dan anak-anak—untuk melayani negara. Sekolah gaya Barat diperkenalkan sebagai agen untuk mencapai tujuan itu. Pada tahun 1890-an, sekolah telah menghasilkan kepekaan baru tentang masa kanak-kanak. Setelah tahun 1890, Jepang memiliki banyak reformis, pakar anak, editor majalah, dan ibu-ibu terdidik yang menerima sensibilitas baru. Mereka mengajari kelas menengah atas model masa kanak-kanak yang mencakup anak-anak yang memiliki ruang sendiri di mana mereka membaca buku anak-anak, bermain dengan mainan edukatif dan, terutama, mencurahkan banyak waktu untuk pekerjaan rumah sekolah. Ide-ide ini dengan cepat disebarluaskan melalui semua kelas sosial.

Pada awal abad ke-20, pendidikan di tingkat dasar egaliter dan hampir universal, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi itu multitrek, sangat selektif, dan elitis. Pendidikan Perguruan Tinggi sebagian besar terbatas pada beberapa universitas kekaisaran, di mana pengaruh Jerman kuat. Tiga dari universitas kekaisaran menerima perempuan, dan ada sejumlah perguruan tinggi perempuan, beberapa cukup bergengsi, tetapi perempuan memiliki kesempatan yang relatif sedikit untuk memasuki pendidikan tinggi. Selama periode ini, sejumlah

universitas didirikan oleh misionaris Kristen, yang juga berperan aktif dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan, khususnya di tingkat menengah.

Pada 1960-an, pemulihan pascaperang dan percepatan pertumbuhan ekonomi membawa tuntutan baru untuk memperluas pendidikan tinggi. Namun seiring tumbuhnya harapan bahwa kualitas pendidikan tinggi akan meningkat, biaya pendidikan tinggi juga meningkat. Secara umum, tahun 1960-an adalah masa pergolakan besar dalam pendidikan tinggi. Pada akhir dekade khususnya, universitas di Jepang diguncang oleh kerusuhan mahasiswa yang mengganggu banyak kampus. Kerusuhan kampus merupakan pertemuan dari sejumlah faktor, termasuk gerakan anti Perang Vietnam di Jepang, perbedaan ideologi antara berbagai kelompok mahasiswa Jepang, perselisihan masalah kampus, seperti disiplin; pemogokan mahasiswa, dan bahkan ketidakpuasan umum terhadap sistem universitas itu sendiri. Pemerintah menanggapi dengan Hukum Kontrol Universitas pada tahun 1969 dan, pada awal 1970-an, dengan reformasi pendidikan lebih lanjut.

Multikultural' sebagai Konsep Sosial

Pemahaman tentang adanya variasi sosial dalam masyarakat Jepang adalah paham yang tidak kontroversial. Sebagaimana dicatat oleh Morris-Suzuki (1998: 156/192), jika kebudayaan dianggap sebagai kepemilikan atas seperangkat ilmu, nilai, dan pengalaman yang sama, maka setiap masyarakat sosial secara definisi bersifat multikultural: kebudayaan pada dasarnya selalu bersifat 'multi'. Namun demikian, perhatian terhadap perbedaan (yang memang selalu ada di Jepang) mungkin telah beranjak terlalu jauh. Ryang (2005: 10/201) menyerukan kewaspadaan terhadap apa yang dia sebut sebagai 'kecenderungan terkini dan terbaru untuk menyajikan Jepang melalui ... sudut pluralistis' dengan semakin meningkatnya perayaan atas keberagaman, kemarginalan dan minoritas. (Hal ini karena) di satu sisi, perhatian berlebihan terhadap etnis minoritas cenderung – sebagaimana ditunjukkan oleh Clammer (2001:7) – mengaburkan dimensi perbedaan lainnya seperti gender dan kelas sosial.

Multikultur" sebagai Political Ideal

Sebagaimana ditunjukkan dari awal, dimana istilah 'Jepang yang Multikultural' sebagai cara ringkas untuk menggambarkan variasi-variasi sosial yang sudah ada sejak dahulu kala, beberapa penulis lain menggunakannya untuk merujuk pada suatu ideologi politik yang baru – dan kebijakan-kebijakan

pemerintah yang menyertainya – yang tampaknya muncul sebagai respons atas meningkatnya jumlah migran di Jepang. Istilah multikulturalisme sendiri sebenarnya bisa diartikan baik sebagai suatu kondisi ideal (suatu ideologi) ataupun sebagai serangkaian kebijakan resmi yang pernah diadopsi oleh para pemerintah di sejumlah ‘settlement countries’ (negeri-negeri menjadi tempat tujuan para migran, seperti Kanada dan Amerika Serikat) dari sejak 1970an. Walau ada berbagai versi, paham multikulturalisme pada dasarnya adalah perayaan tentang – dan sebuah pelajaran tentang pentingnya mempertahankan – kesetaraan dan keberagaman budaya.

Pada suatu masyarakat multikultural, co-existence (hidup berdampingan), toleransi, saling menghormati, dan pertukaran budaya dianggap akan membawa kebaikan pada seluruh bangsa. Walaupun dukungan pada multikulturalisme tidak selalu dipandang sebagai dukungan terhadap imigrasi, pada prakteknya kepercayaan terhadap paham multikulturalisme didasari atas kepercayaan terhadap pentingnya migrasi. Untuk melihat validitas terminologi ‘Jepang yang multikultur’ dalam bingkai political ideal, pertama dapat ditandai penerapan ideologi populer di Jepang yang memandang keragaman etnis, kultural dan rasial serta migrasi sebagai suatu hal yang positif. Kedua, secara konkrit, kebijakan menerapkan perlakuan yang sama terhadap penduduk non-warga negara dan kelompok-kelompok etnis minoritas. Ketiga, semakin banyak dukungan migran yang hadir untuk perubahan masyarakat Jepang .

Kebijakan Multikulturalisme

Jika multikulturalisme sebagai suatu wacana pada level nasional umumnya tidak ada di Jepang, bisa diduga pula bahwa kebijakan konkrit tentang hal itu pun akan absen pula. Kebijakan-kebijakan yang telah diadopsi di settlement countries (negeri tujuan migran) dimana paham multikulturalisme paling tidak pernah diterapkan dan dikembangkan sebagai kebijakan resmi pemerintah adalah: 1) dwi kewarganegaraan (dual citizenship) 2) dukungan pemerintah terhadap koran, televisi, dan radio yang menggunakan bahasa kaum minoritas. 3) dukungan bagi festival, hari besar, dan perayaan kaum minoritas. 4) penerimaan baju keagamaan dan tradisional di sekolah dan masyarakat secara umum. 5) dukungan untuk kesenian dari berbagai kebudayaan di dunia. 6) adanya program untuk mendorong representasi minoritas di komunitas yang lebih besar, dalam politik,

pendidikan, dan angkatan kerja. 7) kebijakan imigrasi yang liberal, penerimaan pengungsi. 8) penghormatan terhadap hukum internasional.⁸

Pertama, Jepang tidak secara resmi mengenal dwi kewarganegaraan. Sejak 1985, anak-anak dari pasangan Jepang - non Jepang tidak bisa mendapatkan dwi kewarganegaraan, namun mereka diminta untuk memilih salah satu kewarganegaraan ketika mereka berusia dua puluh tahun. Kedua, sedikit sekali hal yang membuktikan adanya dukungan pemerintah terhadap media 'etnis'. Buku "Pedoman Media Etnis" karya Moriguchi (1997) mendaftarkan ada sekitar 160 publikasi dalam 15 bahasa selain bahasa Jepang di Jepang, sedangkan Shiramizu (2000; 2004) mencatat ada 200 publikasi, sebagian besar berbahasa Inggris, Cina, Korea, dan Portugis, dan umumnya disertai dengan terjemahan bahasa Jepang. Namun demikian, meski beberapa penerbit memang memiliki angka penjualan hingga puluhan ribu eksemplar, sebagian besar publikasi tersebut dijalankan oleh sekelompok kecil relawan atau oleh NGO dengan sirkulasi peredaran yang kecil. Poin kuncinya adalah kurangnya dukungan pemerintah nasional dan, sehubungan dengan itu, kurangnya media etnis yang bersifat nasional – walaupun pemerintah lokal memang mengeluarkan newsletter, majalah, brosur yang multibahasa.

Sikap pemerintah nasional juga berlaku untuk kebijakankebijakan multikultural potensial lainnya. Dukungan terhadap hari festival, hari besar, dan hari perayaan kelompok-kelompok minoritas praktis tak pernah didengar, walaupun banyak agen lokal, mengadakan acara kokusai koryu (pertukaran internasional) dimana kebudayaan asing diperkenalkan. Memang ada perhatian dan aktivitas yang tinggi di tingkat akar rumput tentang praktek-praktek kebudayaan asing (musik, makanan, bahasa).⁹

Dalam nada yang lebih positif, dukungan Jepang terhadap kesenian kebudayaan dari seluruh dunia sangat baik. Sebagai contoh, Agensi Kebudayaan mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mempromosikan pertukaran kebudayaan, serta juga mempromosikan kebudayaan asli Ainu. Pencanaan Tahun-tahun Pertukaran Nasional membuat para artis pertunjukan, seniman, dan tokoh kebudayaan bisa mengunjungi Jepang dari negara-negara asing. Expo tahun 2005 di prefektur Aichi, khususnya, merupakan sukses luar biasa, mengenalkan

⁸ Edy Hariyadi, "HOMOGENITAS VERSUS MULTIKULTURALISME: PERDEBATAN PENERIMAAN PEKERJA ASING DI JEPANG," *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 13, no. 2 (December 8, 2014),

⁹ ANI MUZAYAROH, *Konsep Dan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam*, Query date: 2021

pada lebih dari 22 juta orang pengunjung tentang beragam kebudayaan dan organisasi dari seluruh dunia.

Perkembangan Pendidikan Negara Jepang

Jepang memiliki sistem pendidikan yang baik di dunia, dikarenakan Jepang sudah memiliki banyak fasilitas yang mendukung dan juga SDM yang mumpuni. Negara Jepang dijadikan patokan oleh negara berkembang sebagai kiblat untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Johan 2018). Negara Jepang dari dulu hingga saat ini unggul dari segi teknologi dan juga dari segi pendidikannya, hal ini dikarenakan negara Jepang merupakan negara maju yang memiliki kualitas yang unggul (Johan 2018).

Di Negara Jepang juga yang di ajarkan di sekolah itu bukan hanya tentang materi pelajaran, tetapi juga tentang norma-norma yang berlaku, seperti sopan santun, kejujuran, empati dan simpati (Connie Chairunnisa, Istayatiningtias et al. 2019). Di Jepang anak-anak sekolah dasar tidak akan mendapatkan ujian hingga sampai di kelas empat (Soetantyo 2013). Di negara Jepang ujian yang akan dilaksanakan sebelum anak mencapai kelas 4 Sekolah Dasar adalah ujian-ujian yang tidak berat, ujian yang sederhana yang tidak terlalu membebani anak-anak (Zarman 2017). Untuk usia dari 0-3 tahun pertama anak-anak di Jepang lebih diajarkan berkaitan dengan tata krama, sopan santun, membangun kepribadian yang baik dan mrngikuti nilai serta norma yang ada (Johan 2018). Di Negara Jepang kepribadian yang baik, disiplin, taat dengan peraturan tidak kalah penting dengan kepintaran yang di ajarkan di dalam kelas (Zarman 2017). Di negara Indonesia masih banyaknya orangtua dan guru menuntu peserta didik dari segi akademis saja dan terkadang mengenyampingkan proses yang seharusnya juga dicapai dengan jalan yang baik.

Jepang bisa menjadi negara percontohan di bidang pendidikan, dikarenakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak salah belajar lebih banyak dengan negara Jepang bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi dari sistem pendidikan yang ada (Sahban and SE 2018). Ada beberapa hal dari pola pendidikan di Jepang yang bisa dijadikan pedoman baru di Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya agar negara Indonesia jauh lebih baik lagi kedepannya (Soetantyo 2013)¹⁰

¹⁰ Dian Montanesa and Firman Firman, "Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia Dan Jepang," *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 2017

Sistem pendidikan Negara Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Legalisme: Pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun, suku, agama, ras, dan antar golongan berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
2. Administrasi yang Demokratis: Negara memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Biaya pendidikan Jepang di usahakan untuk bisa terjangkau sesuai keuangan masyarakatnya, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun kurang mampu.
3. Netralitas: Pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswanya tanpa membedakan latar belakang materil, asal-usul keluarga, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan.
4. Penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan: Dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan masing-masing yang disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan yang ditempuh.
5. Desentralisasi: Penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada dinegara tersebut sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan sehingga dapat diikuti dengan baik¹¹

Kesimpulan

Perkembangan pendidikan di Jepang secara tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan Jepang, tentang bagaimana masyarakat Jepang berhasil berkembang dari tradisional menjadi masyarakat industri modern. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Jepang mampu untuk beradaptasi dan mempunyai kemampuan untuk bergerak terhadap perubahan zaman. Dalam perkembangannya, masyarakat Jepang melakukan reformasi dan mempersiapkan diri dari datangnya pengaruh kebudayaan lain. Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang berhasil berkembang dari tradisional menjadi masyarakat industri modern dengan caranya sendiri. Keberhasilan Jepang disebabkan keberhasilan adaptasi terhadap model – model pembaharuan yang berasal dari luar dan kondisi masyarakat Jepang yang berusia ribuan tahun memiliki kekuatan –

¹¹ Montanesa and Firman, “Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia Dan Jepang.”

kekuatan yang memungkinkan untuk survival, bahkan manjadi masyarakat modern berkategori kelas satu di dunia.¹²

Dari ulasan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan mengenai konsep multikulturalisme khususnya di dua negara Indonesia-Japan. Bahwa konsep multikulturalisme maupun homogenitas keduanya lahir sejalan dengan sejarah sepak terjang berdirinya suatu negara jadi dapat dikatakan konsep ini menggambarkan keadaan asli dan identitas masing-masing bangsa. Jepang yang homogen dan Indonesia yang multikultur menunjukkan identitas individu internalnya masing-masing. Lalu yang kedua bahwa tidak dapat kemudian dengan mudah mengadakan pergantian konsep dengan tiba-tiba. Sebab- konsep tersebut adalah telah menjadi pribadi diri bangsa dimana secara tidak sadarpun akan dijadikan landasan berpikir oleh masyarakat untuk menentukan benar-salahnya suatu keadaan. Sehingga- ketika ada wacana yang berusaha menghegemonikan Jepang yang multikultur, di rasa masih terlalu cepat, sebab yang dihadapi disini adalah pribadi diri bangsa yang telah dianut sejak lama. Namun kemudian tidak lantas perbedaan konsep ini menentukan kemajuan suatu negara.

¹² Citra Kurniawan, Wawasan Pendidikan : Studi Komparatif Sistem Pendidikan Di Beberapa Negara Maju (Korea Selatan dan Jepang)

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F. D. Model Multikulturalisme Masyarakat Jepang Ditinjau dari Kehidupan Umat Muslim di Jepang Pasca Terorisme 9/11. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FIB, 2014
- Burgess ,Chris. Jepang yang multikultur? Wacana dan mitos homogenitas. e-journal. 2017 Translated by Dipo Siahaan with the assistance of Susy Nataliwati, Muhamamad Surya and Danarto Surya YuDo.
- Hariyadi, Edy. “HOMOGENITAS VERSUS MULTIKULTURALISME: PERDEBATAN PENERIMAAN PEKERJA ASING DI JEPANG.” *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 13, no. 2 (December 8, 2014).
- Montanesa, Dian, and Firman Firman. “Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia Dan Jepang.” *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 1 (2021)
- MUZAYAROH, ANI. *Konsep Dan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam*. Query date: 2021
- Nazir, Moh. “MetodePenelitian.” *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1988.